

Islamisasi di Nusantara Abad Ke-17 Perspektif Sea Power: Historiografi Malaka, Solor dan Mataram

Moh. Yusni Amru Ghozali

UNUSIA Jakarta

Email: yusni@unusia.ac.id

Abstract

Specifically, this study seeks to break down the strategy of Islamization in the archipelago from the aspect of sea power (port potential). The theme of sea power was targeted in the study as a factor of Islamization because the 17th century Muslim traders experienced a heyday in the archipelago. Several studies have examined Islamization in the archipelago sourced from the coast. But, it has not explicitly mentioned the potential power played by ulama or umara in the Islamization strategy. The topic raised in this study is the Islamization of Malacca, Solor, and Mataram viewed from the perspective of sea power. The discourse raised is the strategy of Islamization of various potential aspects contained in the port such as political, social, cultural and economic aspects. The theory used to see multicausal in the process of Islamization is the theory of history. This study concludes that the pattern of cultural power built by Malacca is to build collaboration between Islamic law and customary law. Meanwhile, economic power is built by introducing muamalah Islam through symbols of fair and harmless policies. Mataram in terms of Islamization, bringing together Islamic students on the coast and Islamic Kejawan, through cultural policies (culture power). Meanwhile, Solor is more dominant in using political power through indigenization where Islamization is carried out by building an Islamic sultanate to accommodate the anti-colonial attitude of the local community. Furthermore, Islamization studies on more specific aspects are very meaningful for the development of Islamic historiography of the archipelago.

Keywords: Archipelago, Islamization, Historiography, Sea Power, Solor History

Pendahuluan

Meilink-Roelofs mengatakannya bahwa letak geografis Nusantara secara keseluruhan berada di antara Samudera Hindia dan Lautan Cina. Oleh karena itu, ia menjadi wilayah transit dan tempat yang strategis bagi para pedagang dari berbagai bangsa untuk bertemu dan berinteraksi¹. Di Nusantara, pelabuhan merupakan pintu gerbang, tempat dimana berbagai bangsa dari luar datang dan dari pedalaman menghampiri karena hasil bumi dan kekayaan alam lebih mudah dijual di pantai. Di pelabuhan banyak saudagar yang siap membeli komoditas apa saja yang diperdagangkan. Lombard mengatakan, “Pelabuhan-pelabuhan dagang di pantai hidup dari perdagangan hasil bumi yang dibawa dari pedalaman dan dijual kepada pedagang lintas jauh².” Dalam peradaban maritim, pelabuhan menjadi

¹ M. A. P. Meilink-Roelofs, *Asian Trade and European Influence: In the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630* (Dordrecht: Springer Netherlands, 1962), 14, <https://doi.org/10.1007/978-94-011-8850-0>.

² Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Jaman Iskandar Muda (1607-1636)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

pusat ekonomi vital di Nusantara. Suatu kerajaan separuh kekuatannya ada di pelabuhan. Maka, dapat dikatakan strategi untuk menguasai Nusantara saat itu adalah dengan menguasai pelabuhannya.

Pelabuhan merupakan *melting pot* strategis yang menghubungkan antara darat dan laut, antara pelabuhan dan antar pulau. Selain itu, ia menjadi titik temu berbagai aspek pokok kehidupan seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang lainnya. Sehingga dalam konteks Islamisasi, Yatim mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan Islam pada mulanya banyak berdiri di daerah pesisir atau pelabuhan, setelah itu, Islam masuk secara bertahap ke pedalaman.³ Adapun Laffan menambahkan bahwa pola Islamisasi bukan hanya dari pelabuhan ke pedalaman, tapi juga *port to port* seperti yang dikembangkan Walisongo. Bukti yang diangkat Laffan adalah para Sunan yang tinggal di pesisir utara Jawa, memberi pengaruh besar terhadap Islamisasi di berbagai wilayah pesisir lain di Nusantara. Termasuk yang dilakukan Gowa, ia aktif menyebarkan Islam dari pelabuhan ke pulau tetangga hingga yang lebih jauh seperti Banda, Lombok, dan Sumbawa. Gerakan Islamisasi *port to port* yang dilakukan Gowa, menurut Laffan dimotori oleh para sunan di Giri. Oleh karena itu, pelabuhan memiliki intensitas yang cukup kuat dalam mendekatkan komunitas Muslim di Nusantara. Pusat-pusat perdagangan menjadi simpul yang semakin mendekatkan berbagai kawasan Islam⁴. Penjelasan Laffan menegaskan peran *port power* dalam proses Islamisasi di Nusantara; bahwa pola gerakan Islamisasi, tidak hanya dari pesisir ke pedalaman, tapi juga dari pesisir ke pesisir. Dalam peradaban maritim, banyak hal bermula dari pelabuhan, termasuk Islamisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali pola dan kekuatan yang digunakan ulama dan kerajaan sebagai strategi Islamisasi yang didukung oleh keberadaan pelabuhan di Nusantara.

Para sejarawan telah meneliti Islamisasi di Nusantara dari salurannya seperti yang dilakukan Tjandrasasmita, Yatim dan Al-Attas⁵. Beberapa penelitian lain juga mengkaji tentang Islamisasi di Nusantara yang bersumber dari pantai. Seperti dilakukan Jahroni, yang fokus meneliti peran murid Syaikh Quro dalam menyebarkan Islam di wilayah Karawang pada abad ke-16 dengan menghidupkan institusi-institusi keagamaan di tengah masyarakat pesisir⁶. Katu meneliti Islamisasi di Kajang, Sulawesi Selatan, yang fokus pada peran sufi dengan strategi *cultural accommodation*⁷. Tapi, penelitian-penelitian tersebut belum menyebutkan secara eksplisit kekuatan potensial yang diperankan ulama atau umara dalam strategi Islamisasi. Oleh sebab itu, secara spesifik penelitian ini berupaya

³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).

⁴ Michael Laffan, *The Making of Indonesian Islam* (Yogyakarta: Bentang, 2015).

⁵ Barsihannor ed., *Islam, Literasi Dan Budaya Lokal* (Makassar: Penerbit UIN Alauddin Press, 2014).

⁶ Jajang Jahroni, "Islamisasi Pantai Utara Jawa: Menelusuri Penyiaran Islam di Tanah Betawi," *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 2 (December 2016): 369, <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.506>.

⁷ Barsihannor ed., *Islam, Literasi Dan Budaya Lokal*.

melakukan *break down* strategi Islamisasi di Nusantara dari aspek *port power* (potensi pelabuhan) yang secara genealogis melanjutkan teori Islamisasi Tjandrasasmita, yang membagi Islamisasi pada saluran-saluran. Seperti saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik⁸. Tema *port power* dibidik dalam penelitian ini sebagai bagian penting dari Islamisasi karena abad ke-14 dan ke-17 pedagang Muslim mengalami masa kejayaan di Nusantara⁹. Apalagi maritim, rempah, dan Islam dari sejak abad ke-15 atau sebelum itu, memiliki hubungan kausalitas yang kokoh dalam peradaban Nusantara.

Ada tiga wilayah kekuasaan yang diambil sebagai *sample* dalam penelitian ini yakni Malaka, Mataram dan Solor. Pijakan yang digunakan untuk memilih ketiga wilayah tersebut berdasarkan pertimbangan teori Taufik Abdullah yang membagi pola Islamisasi di Nusantara berdasarkan wilayah yakni pola Pasai, pola Malaka dan pola Mataram¹⁰. Terkait Solor, meskipun tidak masuk dalam wilayah pola Islamisasi versi Taufik Abdullah, tetapi pertimbangannya adalah karena merupakan pelabuhan penting sejak zaman Majapahit pada abad ke-14¹¹. Solor memiliki pola Islamisasi yang sama dengan Mataram, dimana masyarakatnya masuk Islam setelah para raja. Ia memiliki karakteristik Islamisasi yang unik dalam memerankan *power strategy* yang kemudian disebut oleh Dietrich dengan indigenisasi¹². Berpijak pada temuan itulah penelitian ini mengangkat Solor bagian dari objek penting yang dibahas. Selain itu, pada abad ke-17, Islam memiliki peran besar dalam membangun koneksi antar kerajaan dan pelabuhan di timur Nusantara¹³ sehingga *power strategy* dalam proses Islamisasinya lahir dari hubungan dinamis antara kerajaan dan pelabuhan. Di lain pihak, Timur Nusantara harus diangkat dalam popularitas penelitian sejarah, sebagaimana popularitas yang semestinnnya di zaman tersebut, tanpa peduli bagaimana modernitas telah memerlakukan Timur Nusantara.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengikuti prinsip penelitian sejarah yang bersifat deskriptif-analitis; fokus pada topik tertentu dengan mengangkat diskursus yang ada di

⁸ Uka Tjandrasasmita, *Sejarah Nasional Indonesia III*, 1st ed., 1 (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 1:188–95.

⁹ Jahroni, “Islamisasi Pantai Utara Jawa.”

¹⁰ Barsihannor ed., *Islam, Literasi Dan Budaya Lokal*.

¹¹ R.H. Barnes, “Avarice and Iniquity at the Solor Fort,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 143, no. 2 (January 1987): 208–36, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003326>.

¹² Stefan Dietrich, “A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 140, no. 2 (1984): 317–26, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003420>.

¹³ Dietrich, “A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands.”

dalamnya¹⁴. Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah Islamisasi Malaka, Solor, dan Mataram dilihat dengan perspektif *sea power*. Adapun diskursus yang diangkat adalah strategi Islamisasi dari berbagai aspek potensial yang terdapat di pelabuhan seperti aspek politik, sosial, budaya dan ekonomi. Teori yang digunakan untuk melihat multikausal yang ada dalam proses Islamisasi ini adalah teori sejarah. Dalam hal ini, ada empat langkah utama yang dilakukan yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi¹⁵.

Melalui kajian literatur penelitian ini menjelaskan bagaimana kerajaan Islam Malaka, Mataram dan Solor memanfaatkan kekuatan pelabuhan sebagai konsep kekuatan yang menopang perekonomian, Islamisasi dan pengembangan wilayah mereka. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut memahami pentingnya *port power* sebagai aktivitas ekonomi dan memanfaatkan potensinya untuk memperkuat posisi sebagai kerajaan maritim. Dengan penjelasan historiografi akan dijelaskan bagaimana Malaka, Mataram dan Solor memperhitungkan peran pelabuhan terutama dalam konteks sebagai fasilitas perdagangan dan memperluas jangkauan pasar. Termasuk sebagai tempat strategis untuk mempromosikan berbagai komoditi, budaya dan tradisi, secara langsung atau tidak langsung.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Genealogis *Geostrategic* Islamisasi di Nusantara

Para sejarawan memiliki kesepakatan bersama mengenai *geostrategic* penyebaran Islam di Nusantara bahwa pola yang terjadi bermula dari pelabuhan. Banyak ahli yang mendukung gagasan tersebut; bahwa gerakan penyebaran Islam, muncul dan berkembang dari pesisir atau pelabuhan, kemudian menuju ke pedalaman. Para sejarawan secara transmitif mengutip teori ini dari sumber yang sama. Diantara yang memopulerkan gagasan ini adalah Badri Yatim dalam bukunya *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Badri Yatim merujuk pendapat S.O. Robson dalam tulisannya yang berjudul *Java at Crossroads: Aspects of Javanese Culture History in the 14th and 15th Centuries*¹⁶. Robson sendiri mengutip dari Tome Pires dalam bukunya *The Suma Oriental*¹⁷. Tidak ada lagi sumber lain yang lebih tua dari Pires, khususnya terkait pernyataan bahwa Islam disebarkan dari pelabuhan ke pedalaman.

Sarjana barat lain yang mengusung gagasan penyebaran Islam dari pelabuhan ke pedalaman dan menuangkannya dalam karya adalah Rikclefs. Pendapat Rikclefs tersebut kemudian dikutip oleh Ahmad Ibrahim dalam bukunya *Islam di Asia*

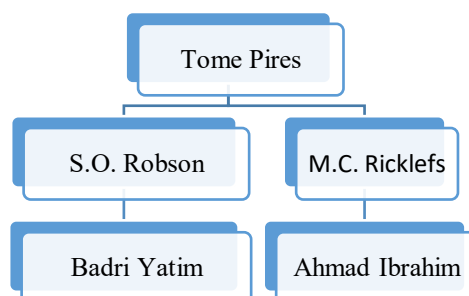
¹⁴ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 60–62.

¹⁵ L. Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), 32.

¹⁶ S.O. Robson, "Java at the Crossroads; Aspects of Javanese Cultural History in the 14th and 15th Centuries," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 137, nos. 2–3 (1981): 259–92, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003500>.

¹⁷ Tome Pires, *Suma Oriental*, vol. 1, 1 (New Delhi: AES Publication, 2005).

*Tenggara*¹⁸. Badri Yatim mengutip Robson, sedangkan Ahmad Ibrahim mengutip Rikclefs. Baik Robson atau Rikclefs merujuk dari Tome Pires dalam bukunya *The Suma Oriental*. Skema yang memudahkan gambaran genealogi dari transmisi gagasan tersebut adalah sebagai berikut,



Adapun pernyataan lengkap¹⁹ adalah sebagai berikut, “*At the time when there were heathens along the sea coast of Java, many merchants used to come, Parsees, Arabs, Gujaratees, Bengalees, Malays and other nationalities, there being many Moors among them. They began to trade in the country and to grow rich. They succeeded in way of making mosques and mollahs came from outside, so that they came in such growing numbers that the sons of these said Moors were already Javanese and rich, for they had been in these parts for about seventy years. In some places the hethen Javanese lords themselves turned Mohammedan, and these mollahs and the merchant Moors took possession of these palces. Others had a way of fortifying the palces were they lived, and they took pople of their own who sailed in their junks, and they killed the Javanese lords; and this way they made themselves masters of the sea coast and took over trade and power in Java.*”

Laut pasti bertepi, dan jejaknya pasti berlabuh ke pantai. Atau, bahasa Tjandrasasimita, “Sejauh-jauh kapal berlayar, sekali kelak ia masuk ke pelabuhan.”²⁰. Ungkapan menegaskan bahwa setelah *sea power* adalah *sea coast power* atau *port power* yang itu dimanfaatkan secara baik ulama Nusantara sebagai strategi penyebaran Islam di Nusantara, khususnya pada abad ke-17.

Peradaban Maritim di Nusantara

Menjelaskan periodisasi kemaritiman Nusantara bisa dengan mengacu pada periodisasi Nusantara itu sendiri. Meskipun penting dalam membahas kemaritiman di Nusantara ini mencari wilayah mana yang pertama kali menjadi pusat maritim, termasuk dinamika perubahan pusat maritim karena pengaruh komoditas dagang dan logistik pada masa-masa Nusantara dan isu-isu strategis lainnya.

Lopa dalam bukunya *Djalanja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat* membagi sejarah Indonesia menjadi tiga periode yakni tahun 0-600 Masehi. Pada

¹⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014).

¹⁹ Tome Pires, *The Suma Oriental* (London: The Hakluyt Society, 1944).

²⁰ Uka Tjandrasasmita, ed., *Sejarah Nasional Indonesia III* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).

periode ini, Lopa, mengungkap kisah Valmiki tentang *Yawa-dwipa*. Periode kedua adalah antara tahun 600 hingga 1500 Masehi, dimana Lopa menjelaskan secara garis besar tentang dua kerajaan besar yakni Sriwijaya dan Majapahit. Dan, pada periode ketiga antara tahun 1500 hingga tahun 1945, Lopa menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan pasca Majapahit hingga berdirinya negara Indonesia²¹.

Berbeda halnya dengan Reni, dimana ia dalam menulis sejarah maritim, mengacu pada tiga kerajaan besar dimana ia mengawali dari periode Sriwijaya (Abad ke-7-13), periode Majapahit (abad ke-8-15), periode Demak (abad ke-15-16), lalu pasca kemerdekaan RI²². Reni tidak menjelaskan secara eksplisit pasca abad ke-16 hingga kemerdekaan Indonesia tentang kemaritiman. Ada kemungkinan, ceruk kosong ini memiliki relasi dengan isu jalur darat yang dibangun oleh Deandels sehingga mengurai potensi kemaritiman di Nusantara.

Menurut Valmiki yang hidup jauh sebelum Masehi dalam *Ramayana*-nya ada satu wilayah yang disebut dengan *Yawa-dwipa*, tepatnya pada *Canto XL*²³. *Yawa* atau *yawa* dalam bahasa Sanskerta artinya adalah jelai sedangkan *dwipa* sendiri memiliki makna pulau, jadi *yawa-dwipa* artinya adalah pulau jelai²⁴. Disebut juga dalam *Ramayana* nama *Jambu-dwipa*²⁵. Adapun yang dimaksud dengan pulau *Yawa-dwipa* adalah pulau Jawa dengan perdebatan akademik yang pelik²⁶. Seperti halnya *suwarna-dwipa* artinya pulau emas yang dimaksud adalah Sumatra²⁷. *Yawa-dwipa* ini dari sebelum Masehi sudah menjalin hubungan dengan Cina bahkan telah mengirim utusan ke sana²⁸. Hall juga menyebut bahwa probabilitas hubungan Nusantara dengan India sudah terjalin sejak zaman pra sejarah melalui pelabuhan-pelabuhan bagian barat Nusantara²⁹.

Warsito menambahkan bahwa Jawa (*Yawa-dwipa*) memiliki teknologi perkapalan lebih canggih dibanding wilayah lain di Nusantara³⁰. Meskipun tidak dijelaskan secara detail keunggulan teknologi kapal *Yawa-dwipa*, paling tidak pernyataan Warsito menyiratkan adanya kontestasi teknologi kapal di Nusantara

²¹ Baharudin Lopa, *Djalanja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat* (Jakarta: Perusahaan Pertjetakan Negara Djakarta, 1962).

²² Wa Ode Reni, "Sejarah Maritim Indonesia," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (2024): 120–27.

²³ Maharsi Valmiki, "Srimad Valmiki Ramayana," Gita Press, 2020, <https://ia800509.us.archive.org/28/items/valmiki-ramayana-gita-press-english/Valmiki%20Ramayana%20Gita%20Press%20English.pdf>.

²⁴ Waruno Mahdi, "Yavadvipa and the Merapi Volcano in West Sumatra," *Archipel* 75, no. 1 (2008): 111–43, <https://doi.org/10.3406/arch.2008.4083>.

²⁵ Valmiki, "Srimad Valmiki Ramayana."

²⁶ Mahdi, "Yavadvipa and the Merapi Volcano in West Sumatra."

²⁷ Pijnappel, "Ptolemaeus En de Indische Archipel," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 1, vol. 17 (January 1870): 33–68, https://brill.com/view/journals/bki/17/1/article-p36_14.xml?language=en.

²⁸ Sartika Intaning Pradhani, "Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini," *Lembaran Sejarah* 13, no. 2 (February 2018): 186, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542>.

²⁹ D G E Hall, *A History of South-East Asia* (London: Macmillan Education UK, 1981), <https://doi.org/10.1007/978-1-349-16521-6>.

³⁰ Pradhani, "Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini."

jauh sebelum Sriwijaya. Bukti-bukti tersebut mengindikasikan terbangunnya peradaban maritime di *Yawa-dwipa*. Peradaban yang selanjutnya dijaga kelestariannya oleh kerajaan-kerajaan besar setelah *Yawa-dwipa* seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, serta kerajaan-kerajaan lain³¹. Pernyataan Warsito dan Hall tersebut mengusik adanya ulasan yang detail tentang kemaritiman *Yawa-dwipa* sehingga ia menjadi titik mula periode kemaritiman di Nusantara. Untuk menjelaskan itu, tentu membutuhkan usaha yang maksimal, mengingat Valmiki sendiri dalam *Ramayana* saat menggambarkan *Yawa-dwipa* lebih banyak menyebut gunung dan hutan. Meskipun ada kata kunci yang bisa dijadikan *clue* untuk menjelaskan kemaritiman, semisal dalam terjemahan Bahasa Inggris *Ramayana* ada kalimat, “*crossing by sheer*”, “*shore of the sea*”, “*scour the most dreadful islands*” dan yang lain³².

Pada abad-abad setelahnya dikenal juga nama-nama lain dari *Yawa-dwipa* dalam catatan para ahli dan petualang. Ptolemy menyebutnya dengan *Iabadius* yang terkenal pulau ini dengan emas dan jelainya³³. Wilkinson lebih detail menguraikan *Iabadius* berasal dari *Iabadiou* atau *Iava-diou*, atau *Iva-dvipa*, yang memiliki arti *the land of millet* atau *the land of grain* yakni ladang jagung atau ladang biji-bijian. Lebih lanjut Wilkinson menegaskan adanya hubungan *Yawa-dwipa* dengan bangsa India, tapi dia merujuk pada pendapat ahli dari Belanda yang meyakini bahwa orang-orang India tidak menetap di *Yawa-dwipa*, hanya hubungan dagang dengan penduduk lokal dan singgah sementara³⁴.

Setelah Ptolemy, data lain yang menguatkan adanya rute laut yang sudah terbentuk dari awal abad Masehi adalah catatan perjalanan Shi Fa Hian. Di jelaskan dalam catatan perjalanan Fa Hian ketika berangkat ke Ceylon dalam 90 hari perjalanan kapalnya bocor dan singga di Ye-pho-thi. Di sana, Fa Hian singgah selama 5 bulan lamanya. Mayoritas penduduknya menurut amatan Fa Hian mengikuti ajaran Brahmana³⁵. Lebih detail Rawlinson menafsirkan dari penggambaran dalam catatan perjalanan Fa Hian, Jawa pada awal abad Masehi merupakan *entrepot* Asia Tenggara, sebanda dengan Arabian Port³⁶.

Rawlinson menjelaskan bahwa wilayah Ye-pho-thi ini mendapatkan kunjungan lagi oleh petualang lain yakni Ibnu Batuta pada abad ke-14 Masehi³⁷. Identitas Nusantara, khususnya Jawa dan Sumatra sebagai destinasi dalam

³¹ Ismail Ali, Singgih Tri Sulistiyono, and Encep Supriatna, “Memertabatkan Semula Sejarah Maritim Sebagai Suatu Disiplin dan Cadang Ilmu dalam Mendepani Perkembangan Semasa Ilmu Kelautan Modern,” *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime* 2, no. 2 (December 2021): 68–93, <https://doi.org/10.17509/ijom.v2i2.40659>.

³² Valmiki, “Srimad Valmiki Ramayana.”

³³ H.G. Rawlinson, *Intercourse between India and the Western World from the Earliest Times to the Fall of Rome* (Cambridge: Cambridge Univ Press, 1916).

³⁴ R.J. Wilkinson, “Early Indian Influence in Malaysia,” *JRASMB*, 1935.

³⁵ H. H. Wilson, “Art. VIII.— *Account of the Foe Kúe Ki, or Travels of Fa Hian in India*,” *Journal of the Royal Asiatic Society* 5, no. 9 (January 1838): 108–40, <https://doi.org/10.1017/S0035869X00015185>.

³⁶ Rawlinson, *Intercourse between India and the Western World from the Earliest Times to the Fall of Rome*.

³⁷ Rawlinson, *Intercourse between India and the Western World from the Earliest Times to the Fall of Rome*.

peradaban maritim, sejak abad sebelum Masehi sudah diakui dunia. Meskipun dari data-data sejarah tersebut masih menunjukkan keberadaan Nusantara sebagai objek, yang dikunjungi para petualang dan pedagang. Mulai dari catatan Valmiki, Ptolemy, Fa Hian, dan Ibnu Batuta, Nusantara tergambarkan secara kronologis dari perspektif maritimnya. Tapi, jika melihat pada teori Laughton pertukaran ide dan gagasan melalui interaksi yang sudah terjalin tidaklah mustahil terjadi sehingga masyarakat pada saat itu saling mengadopsi dan meniru³⁸. Dalam konteks ini bisa dalam teknologi perahu, navigasi dan termasuk juga jalur laut.

Horridge lebih tegas mengatakan bahwa masyarakat Nusantara telah menguasai teknologi pembuatan perahu atau kapal, termasuk navigasi sejak berabad-abad lamanya; sejak penutur Austronesia migrasi dari Formosa ke Nusantara³⁹. Kira-kira 4000 tahun yang lalu⁴⁰. Bukti-bukti lain juga ditemukan dalam bentuk gambar cadas di beberapa wilayah seperti di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Berbagai macam motif perahu digambarkan dengan jelas⁴¹. Masyarakat Nusantara telah ikut andil dalam kemajuan teknologi kapal dalam peradaban maritim semakin terbukti dengan ditemukannya situs kapal kuno di Punjulharjo, Rembang pada tahun 2008. Diduga kapal kuno ini dibuat pada abad ke-7 Masehi⁴². Tidak hanya di Punjulharjo, di beberapa wilayah lain juga ditemukan artefak perahu, seperti di Indramayu dan Cirebon.

Maritim adalah bagian dari *body of knowledge* dalam kajian Nusantara. Melihat maritim dari berbagai aspeknya merupakan nafas penelitian di Nusantara sebagai negeri kepulauan. Dalam penelitian ini periodisasi maritim menjadi perspektif untuk menelisik faktor-faktor genealogis terkait kehadiran Islam di Nusantara. Peradaban maritim Nusantara yang sudah megah sejak awal abad Masehi, menunjukkan proses terbangunnya naluri bangsa yang terbuka dengan kehadiran berbagai budaya, tradisi dan agama. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Nusantara, sejajar dan semudah dengan kehadiran berbagai agama dan kepercayaan yang lain. Kebijaksanaan dari ajaran agama yang lebih dahulu berkembang telah membentuk masyarakat Nusantara yang kosmopolit dan berperadaban luhur.

Power Maritim Nusantara dalam Proses Islamisasi

Sejarah panjang fungsi laut sebagai tumpuan ekonomi, politik dan budaya negara kepulauan (*archipelago*), tidak bisa diabaikan. Seorang kapten Amerika, A.T. Mahan bahkan menemukan teori tentang *sea power* yang menjadi bagian dari judul bukunya itu sendiri, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*.

³⁸ Leonard G. Carr Laughton, *Old Ship Figure-Heads and Sterns* (New York: Dover Publications, 2011).

³⁹ A. Horridge, *Perahu Layar Tradisional Nusantara* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).

⁴⁰ Truman Simanjuntak, "Progres Penelitian Austronesia Di Nusantara.," *AMERTA* 33, no. 1 (June 2015): 25, <https://doi.org/10.24832/amt.v33i1.211>.

⁴¹ A.A. Oktaviana, "Teknik Menggerakkan Perahu Yang Terekam Dalam Seni Cadas Sebagai Kekayaan Seni Dan Maritim Di Indonesia.," in *Arkeologi Untuk Publik, Rahardjo, S. (Ed)* (Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, 2012).

⁴² Asyhad Mufsi Sadzali, "EVALUASI KONSERVASI PERAHU KUNO PUNJULHARJO DAN PENGEMBANGAN OBJEK DI MASA DEPAN DALAM PERKUATAN IDENTITAS," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 2, no. 1 (2018), <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.

A.T. Mahan menjelaskan tentang pengaruh dan unsur-unsur kekuatan laut dalam sejarah panjang peradaban dunia. Ia menganalisis berbagai peperangan yang terjadi di laut, antara Inggris dan Prancis, Inggris dengan Spanyol, dan berbagai peperangan lain di Eropa. A.T. Mahan mengatakan, “*It is easy to say in a general way, that the use and control of the sea is and has been a great factor in the history of the world*”⁴³. Kekuatan laut yang disorot A.T. Mahan ini merupakan perspektif yang kokoh untuk menjadi acuan penelitian ini dalam melihat Nusantara yang peradabannya dibangun dari maritim⁴⁴.

Bagi A.T. Mahan, unsur utama kekuatan laut adalah dua yakni *sea* dan *naval*⁴⁵. Ini karena dia melihat dari berbagai peristiwa peperangan yang terjadi di laut. Tapi, perlu dicatat bahwa mereka yang berperang di laut adalah orang-orang daratan dan pasti akan kembali ke darat. Kekuatan laut (*sea power*) tidak berhenti di laut, ia akan dibawa pengaruhnya ke pusat-pusat kekuasaan yang berada di daratan, sebagai titik bermula dan kembali. Wilayah darat yang menjadi persinggahan dalam peradaban maritim adalah wilayah pesisir (*sea coast*) atau pelabuhan.

Soeharto, Presiden RI kedua, menyampaikan pendapat yang menarik. Ia mengatakan, “*Sebagai negara kepulauan dan bangsa pelaut, pelabuhan sejak dahulu kala merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan saja menjadi pintu gerbang yang menampung arus lalu lintas orang dan barang, akan tetapi juga menjadi tepat perantara untuk tumbuhnya perdagangan dan kebudayaan dalam daerah dan masyarakat yang bersangkutan*”⁴⁶. Menurut Soeharto, pelabuhan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuhnya perdagangan dan kebudayaan. Secara tersirat, kekuatan ekonomi (*economic power*) dan kekuatan budaya (*culture power*) adalah unsur utama pelabuhan. *Sea power* melahirkan *port power*, dan *port power* didukung oleh *economic power* dan *culture power*.

Pada abad ke-15, ketika peradaban dunia bertumpu pada maritim; banyak kota-kota kosmopolit tumbuh di berbagai wilayah di pesisir dunia. Sebagian sejarawan menyebut kota-kota ini dengan emporium atau emporia. Beberapa emporia yang terkenal pada masa itu adalah Aden dan Mocha di Laut Merah, Muskat, Bandar Abas, dan Hormuz di Teluk Persia, Kambai dan Kalikut di Laut Arab, Satgaon di Teluk Benggala, Khanfu (Kanton) Zaiton, dan Nanking di Laut Cina, dan Malaka di Selat Malaka⁴⁷. Emporia Nusantara diwakili Malaka, termasuk dalam rute perjalanan maritim internasional. Keberadaannya, mendorong lahirnya pelabuhan-pelabuhan kecil yang menopang sebagai transit dan pusat banyak

⁴³ Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783* (New York: Dover Publications, Inc, 1987).

⁴⁴ Jennifer L. Gaynor, “Maritime Southeast Asia: Not Just a Crossroads,” *Association for Asian Studies* 9, no. 2 (2014): 17–18.

⁴⁵ Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*.

⁴⁶ Soeharto, *Kumpulan Pidato-pidato Presiden dibidang Politik dan Keamanan (Polkam) Tahun 1977-1978*, 1st ed., vol. 1, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1978.

⁴⁷ R.Z. Leirissa, G.A. Oshorella, and Yuda B. Tangkilisan, *Sejarah Perokonomian Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996).

aktivitas, mulai dari politik, ekonomi, budaya, agama dan lainnya. Beberapa pakar menyebutnya dengan *transito* atau *enterpot*.

Berpijak pada pertumbuhan kota pantai atau emporia yang pesat, terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, mendorong geostrategi kolonialis untuk menguasai Nusantara dari pesisir, bukan dari pedalaman. Sebagaimana saudagar-saudagar Muslim, baik dari India ataupun Persia, menggunakan kekuatan emporia ini untuk melakukan Islamisasi ke pedalaman. Mereka membangun *economic power* dan *cultural power* dari pelabuhan.

Islamisasi di Malaka

Diantara kerajaan Nusantara yang sejak awal memiliki pengaruh besar lantaran faktor geografis, khususnya pada pelabuhannya, adalah Malaka (803-917H/1400-1511M). Malaka dikenal dengan sebutan “pintu gerbang” Nusantara⁴⁸. Oleh karenanya, ia memiliki peran kontrol terhadap siapa saja yang singgah, terutama yang masuk wilayah kekuasaan Malaka. Posisi strategis yang dimiliki Malaka, menjadikannya sebagai pusat pertemuan. Malaka adalah kota pelabuhan yang metropolis dan kosmopolitan. Murphey menyebutnya dengan *port cities* (kota pantai)⁴⁹.

Berangkat dari pelabuhan, Malaka secara politis membangun hubungan bilateral yang baik dan resmi dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa, termasuk juga Kerajaan Pasai⁵⁰ dan para pedagang luar Nusantara dalam skala internasional⁵¹. Hubungan ini aset penting bagi Malaka karena dari sana kesejahteraan kerajaan dari berbagai aspeknya dibangun. Secara mutual, Malaka membutuhkan peran Jawa terkait suplai bahan pangan untuk kebutuhan kerajaan. Di sisi lain, kedatangan banyak pedagang dari berbagai wilayah—seperti Arab, India, Cina, dan yang lain—adalah potensial *market* yang akan menjadi target konsumen komoditi yang dimiliki Malaka. Pasai adalah produsen lada terbesar di Nusantara, yang menjadi daya tarik pedagang Cina untuk singgah⁵². Selat Malaka menjadi titik kumpul banyak bangsa sehingga terbentuk akulturasi budaya dan identitas masyarakat yang spesifik. Malaka merupakan kantong strategis bagi perkembangan budaya dan ekonomi Nusantara⁵³. Keduanya ini diperankan Malaka dengan baik dalam proses Islamisasi yang juga menjadi kebutuhannya dalam menancapkan hegemoni dan kekuasaan di kepulauan Nusantara. Intensitas dan jejaring kesultanan Islam di abad ke-17 menggambarkan kuat bahwa Islamisasi merupakan kebutuhan para raja, bukan mayor interest para ulama. Artinya, Islamisasi merupakan patronasi penguasa atas

⁴⁸ Taufik Abdullah, ed., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, vol. 1 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991).

⁴⁹ Rhoads Murphey, “On Evolution,” in *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th-20th Centuries*, ed. Frank Broeze (Kinsington: New South Wales University Press, 1989).

⁵⁰ Tjandrasmita, *Sejarah Nasional Indonesia III*.

⁵¹ Edyar, ed., *Sejarah Peradaban Islam*, Busman (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009).

⁵² Tjandrasmita, *Sejarah Nasional Indonesia III*.

⁵³ Libra Hari Inagurasi, “SITUS PANTAI LHOK CUT DAN LUBUK SEBAGAI PELABUHAN KOSMOPOLITAN DI SELAT MALAKA ABAD KE 13—15,” *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 10, no. 1 (July 2021): 1–16, <https://doi.org/10.24164/pw.v10i1.351>.

ulama⁵⁴. Ulama mendapat “kontrak kerja” yang tidak tertulis untuk menyebarkan Islam demi kokohnya kekuasaan raja atau sultan. Dalam konteks ini, ekonomi dan budaya diperankan sebagai *power strategy* bukan berangkat dari konsep kapitalisme, sehingga ekonomi menjadi “alat paksa” untuk menganut Islam. Tetapi, wajah Islam yang positif dalam konsep dan sistem ekonomi yang dibangun Malaka, menjadi daya tarik memikat.

Kerajaan Malaka ketika masih Hindu, sudah memberikan kesempatan kepada ulama untuk mengembangkan ajaran Islam di wilayahnya. Bahkan, umat Islam diberi hak istimewa untuk mendirikan masjid⁵⁵. Kebijakan politik Malaka cenderung pluralis dari sejak awal sebelum menjadi Islam. Nilai-nilai pluralisme dalam kebijakan politik penguasa Malaka berangkat dari wawasan geopolitis dan geostrategis yang ada. Kesadaran akan pentingnya letak geografis Malaka telah mendewasakan dalam mengelola hubungan bilateral dan membangun peradaban. Berbagai kebijakan politisnya, tidak hegemonik dan otoriter. Inilah bekal *cultural power* yang secara genealogis sudah terbangun sejak lampau dan selanjutnya menjadi kapital utama dalam gerakan Islamisasi yang dilakukan Malaka.

Pola *cultural power* Malaka dalam menyebarkan Islam ke Nusantara diantaranya adalah dengan membangun hukum yang kolaboratif antara hukum Islam dan hukum adat setempat. Konstruksi hukum Islam yang ditegakkan Malaka tidak bersifat reduktif terhadap hukum adat. Wajah hukum Islam yang diterapkan Malaka mengokohkan eksistensi hukum adat yang sudah berlaku⁵⁶. Malaka mengekspresikan itu dalam berbagai regulasi yang ada di pelabuhan. Diantara produk yang dapat menjadi bukti adalah keberadaan Undang-undang Malaka yang salah satu paragrafnya menyatakan⁵⁷, “*Adapun jikalau mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya, maka kenalah denda akan dia setengah harganya, dan setengah akan menteri dan setengah akan tuannya, karena taksirnya tiada dengan setahu materi. Adapun pada hukum Allah, orang mencuri itu tiada harus dibunuh, melainkan dipotong tangannya.*”

Redaksi yang digunakan dalam kutipan Undang-Undang Malaka dengan memilih diksi “hukum Allah”, bukan “hukum Islam” adalah bentuk komunikasi publik yang lahir dari kebijaksanaan dan perspektif budaya yang luas. Istilah “hukum Allah” dengan menyandarkan kata hukum pada nama Tuhan bukan nama agama, lebih ranah publik dan inklusif, ketimbang menyandarkannya pada kata “Islam” yang cenderung eksklusif dan terbatas. Kutipan undang-undang tersebut sekaligus mengenalkan secara tidak langsung hukum Islam sebagai sanksi alternatif yang lebih humanis daripada membunuh pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mengesankan nilai-nilai yang positif di tengah masyarakat

⁵⁴ Carool Kersten, *Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradaban Di Nusantara*, 2nd ed., vol. 1 (Jakarta: Baca, 2017).

⁵⁵ Tjandrasmita, *Sejarah Nasional Indonesia III*.

⁵⁶ Hasan Basori, “Hukum Islam Nusantara: Diaspora Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh Abad Ke-17,” *Tashwirul Afkar* 38, no. 02 (December 2020), <https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.23>.

⁵⁷ Basori, “Hukum Islam Nusantara.”

Nusantara⁵⁸. Reid dalam bukunya *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, menggambarkan tentang kejamnya hukuman di Nusantara sehingga karena utang yang tidak dibayar orang bisa dihukum mati, berzina dihukum mati, mencuri kuda, bahkan sekadar mencuri piring bisa dihukum mati. Paragraf yang dikutip dari Undang-undang Malaka diatas bagian dari upaya penggeseran budaya hukum tidak manusiawi yang sebelumnya berjalan di Nusantara. Hukum Islam yang diterapkan Malaka lebih manusiawi dan masuk akal. Islam lebih cepat diterima oleh masyarakat Malaka karena nilai-nilai luhur yang dirasakna langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perdagangan dan yang lain. Penyebaran doktrin-doktrin hukum Islam ini dikokohkan melalui karya tulis yang menyebar di tengah-tengah masyarakat, khususnya fikih Mazhab Syafi'i⁵⁹.

Tradisi perbudakan menurut Reid merupakan tradisi yang tumbuh kuat di kota-kota maritim di Nusantara, tapi menurun drastis setelah Islam berkuasa pada wilayah-wilayah tertentu seperti Makassar. Jawa bahkan berhenti mengeskpor budak setelah dikuasai Islam. Data yang digunakan Reid cukup kuat ketika ia menegaskan Islamisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya perbudakan di Nusantara karena adanya larangan akan hal itu terhadap sesama Muslim⁶⁰. Humanisme Islam yang diatur dalam undang-undang kerajaan mengenai larangan perbudakan sesama Muslim, merupakan *cultural power* dalam proses Islamisasi. Di wilayah Islam, cara yang paling efektif untuk keluar dari belenggu perbudakan adalah dengan masuk Islam. Saudagar-saudagar Muslim yang datang membawa budak dan tinggal di berbagai pelabuhan di Nusantara juga mengenalkan regulasi yang jelas mengenai budak dalam tradisi hukum Islam. Sultan Malaka juga memiliki budak yang banyak dan dipekerjakan, tetapi sultan memberikan makan, bahkan memberi kesempatan untuk mencari pekerjaan di sela-sela mereka istirahat agar mendapat penghasilan⁶¹.

Adapun pola *economic power* yang dikembangkan Malaka sebagai strategi Islamisasi adalah penerapan kebijakan-kebijakan perniagaan yang sebelumnya masyarakat adat tidak memiliki perangkat hukum yang mengatur. Malaka dengan hukum Islam yang diterapkan mampu menjawab berbagai persoalan, misalnya terkait masalah investasi, ketentuan hukum bagi orang yang jatuh pailit, waris dan yang lain⁶². Dalam konteks *economic power*, Malaka berhasil mengenalkan hukum muamalah Islam melalui simbol-simbol kebijakan yang dirasakan adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Islamisasi di Mataram

Di Jawa, pada masa Sultan Agung (1613-1646), khususnya wilayah kekuasaan Mataram, kota-kota pelabuhan (*ports cities*) dikendalikan secara ketat

⁵⁸ Fahmi Ardi, Muhammad Mabur, and Viyan Hendra E. A., "Sejarah dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia," *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (June 2021): 7–11, <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.02>.

⁵⁹ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 1: Tanah Dibawah Angin* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁶⁰ Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 1: Tanah Dibawah Angin*.

⁶¹ Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 1: Tanah Dibawah Angin*.

⁶² Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 1: Tanah Dibawah Angin*.

oleh keraton. Hingga para bupati pun tidak bisa berdagang di pelabuhan tanpa dapat izin dari keraton (Leirissa et al., 1996). Menurut catatan sejarah, Mataram memulai kekuasaan dari penaklukan pantai, sebagaimana dikatakan Laffan, “Raja ini mengawali kekuasaannya dengan menundukkan pantai utara dan memungkasi rangkaian kemenangannya dengan penjarahan Surabaya pada 1625⁶³.” Antara tahun 1620-1625 adalah masa yang digunakan secara intensif oleh Sultan Agung melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah pantai di Jawa Timur dan Madura⁶⁴.

Menurut Brandes sebagaimana dikutip Sugiyarto⁶⁵ dalam pemerintahan Mataram Islam sistem pemerintahan terbagi dalam empat teritorial utama yakni Kuthagara atau Kuthanegara, ini merupakan pusat pemerintahan. Lapisan kedua adalah Negara Agung, atau Tanah Lungguh, ini merupakan ring satu pemerintahan. Lalu, ada lapisan ketiga yakni Manca Negara, dan lapisan paling jauh adalah Pasisiran. Pasisiran ini terbagi menjadi dua yakni Pasisiran Wetan dan Pasisiran Kulon. Pasisiran Kulon meliputi Brebes, Bentar, Lebaksiyu, Tegal, Pemalang, Batang, Kendal, Demak, dan Kaliwungu. Sedangkan Pasisiran Wetan meliputi Jepara, Kudus, Cengkal, Pati, Juwana, Rembang, Pajangkungan, Lasem, Tuban, Sedayu, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Bangil, Banyuwangi, Blambangan dan Madura.

Melihat data di atas, tampak bahwa wilayah pantai yang menjadi kekuasaan Mataram sangat luas. Sehingga wajar bila Mataram dalam sistem pemerintahannya menggabungkan *double power* yakni pedalaman dan pesisir. Pusat pemerintahan dan pusat perdagangan sinergis dalam satu kontrol kekuasaan sehingga keduanya menjadi kekuatan utama yang tak terpisahkan. Ini merupakan warisan dari sistem pemerintahan Jawa pada masa pra-kolonial. Dalam hal ini konsentrasi kekuasaan bersifat dinamis sehingga perpindahan pusat kekuasaan dari pedalaman ke pesisir atau sebaliknya, memungkinkan dilakukan dalam pemerintahan Jawa pra-kolonial. Misalnya, pada masa Pangeran Wirabaja yang mendirikan keraton di Bonang-Binangun lantaran tempat tersebut menjadi pusat perdagangan kaum Muslim yang datang dari Tuban, Gresik dan Ampel⁶⁶. Pernah juga terjadi, masa dimana pelabuhan Lasem dan pelabuhan lain di Jawa sepi, tepatnya setelah kejatuhan Majapahit sehingga perdagangan di wilayah pesisir melemah. Tapi, sejak pelabuhan kembali mengalami pertumbuhan karena pesisir Jawa dikuasai Islam, Mataram memindahkan pusat kotanya dari pedalaman ke pesisir⁶⁷.

Melihat potensi teritorial yang dimiliki Mataram, maka melanjutkan sistem *double power* Jawa pra kolonial menjadi mutlak dan otomatis. Apalagi jika melihat luasnya wilayah Pasisiran Mataram, tidak mungkin hanya fokus pada pedalaman

⁶³ Laffan, *The Making of Indonesian Islam*.

⁶⁴ Ni Putu Yuniarika Parwati, “Pengaruh Penyerangan Sultan Agung Ke Batavia Terhadap Kondisi Politik Dan Ekonomi Mataram Tahun 1613-1646,” *Social Studies: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2014).

⁶⁵ Sugiyarto Sugiyarto, Agustinus Supriyono, and Endah Sri Hartatik, “Nobility and Land System in the Pre-Colonial Era of the Surakarta and Yogyakarta Kingdoms,” *Paramita: Historical Studies Journal* 30, no. 2 (September 2020): 208–17, <https://doi.org/10.15294/paramita.v30i2.23692>.

⁶⁶ Nurhadi Rangkuti, “Kajian ‘Arkeologi Situs Masa Sejarah’ Di Lasem: Pergeseran Pusat Kegiatan,” *Berkala Arkeologi* 17, no. 1 (May 1997): 38–48, <https://doi.org/10.30883/jba.v17i1.768>.

⁶⁷ Rangkuti, “Kajian ‘Arkeologi Situs Masa Sejarah’ Di Lasem.”

dan mengabaikan peran pelabuhan dalam sistem pemerintahannya. Hanya mengacu pada letak istana kerajaan, lalu menyimpulkan Mataram sebagai kerajaan pedalaman, perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu, strategi Islamisasi Mataram tidak mungkin lepas dari wilayah-wilayah pelabuhan yang menjadi kekuasaannya.

Terkait dengan proses Islamisasi, Islam di Jawa secara umum penyebarannya adalah melalui pesisir, yang selanjutnya berangsur-angsur masuk ke pedalaman. Di kota-kota pelabuhan, pada masa Mataram, sebagian dari ajaran Islam sudah menjadi sikap budaya yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat kosmopolitan⁶⁸; dipraktikkan berbagai kalangan dan bangsa. Fenomena ini diduga kuat merupakan pengaruh dakwah sebelumnya dari Sunan Bonang yang mengembangkan ajaran Islam melalui sistem mandala. Basis Islamisasi yang dikembangkan melalui sistem mandala adalah kultural religius⁶⁹. Dalam konteks ini, Sunan Bonang mengonstruksi hubungan yang positif dan produktif dengan semua masyarakat dari berbagai kelompok, etnis, budaya dan agama yang telah berbaur di pelabuhan. Sehingga, tradisi akulturatif tersebut terwariskan dari generasi ke generasi secara kontinyu. Konstruksi tersebut kemudian dikonseptualisasikan oleh Sultan Agung dalam kebijakan-kebijakan kebudayaan dalam proses Islamisasi di Mataram khususnya, dan Jawa pada umumnya. Diantara bentuk-bentuk kebijakan kebudayaan yang diinisiasi Sultan Agung misalnya seperti sistem kalender yang memadukan antara Jawa dan Islam, Serat, Gendhing, strata bahasa *ngoko* dan *kromo*, perayaan Grebeg, Sekaten, Babad dan yang lain⁷⁰. Hal ini menunjukkan *culture power* yang dibangun Sultan Agung dalam mengokohkan Islam sekaligus juga kekuasaannya di Jawa.

Meskipun wilayah kekuasaan pesisiran begitu luas, Mataram dianggap sebagian peneliti sebagai kerajaan pedalaman. Islam yang diekspresikan oleh Mataram dengan Islam yang diekspresikan kerajaan Islam pesisir seperti Demak, menunjukkan adanya perbedaan. Dimana Mataram lebih menunjukkan Islam Kejawen, sedangkan Islam yang berkembang di pesisir lebih menunjukkan Islam santri. Peran Mataram dalam proses Islamisasi di sini adalah membangun akulturasi antara Islam Kejawen dengan Islam Santri. Mataram membuka kran pertemuan antara dua corak Islam yang berbeda. Sehingga akulturasi ini melahirkan dialog yang kuat antara corak Islam pedalaman dan Islam pesisir. Dalam konteks ini, Mataram berhasil menarik Islam Santri ke pedalaman⁷¹.

Pasca Sultan Agung wafat, Mataram dikuasai oleh sultan-sultan yang lemah. Di dalam kesultanan sendiri sering terjadi konflik dan tak jarang berujung perang. Mataram semakin lemah ketika Trunojoyo melakukan pemberontakan. Pada saat Amangkurat I merasa kewalahan menghadapi Trunojoyo, ia meminta bantuan

⁶⁸ Barsihannor ed., *Islam, Literasi Dan Budaya Lokal*.

⁶⁹ Muhammad Nabil Fahmi, Ida Fitri Anggarini, and Obaidul Hoque, "The History of Sunan Bonang Mandala in The Lasem Chronicle (Carita Lasem)," *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 9, no. 1 (July 2024): 20–38, <https://doi.org/10.18784/analisa.v9i1.2219>.

⁷⁰ M. Ilham Wahyudi, "Sunan Giri dalam Legitimasi Kekuasaan Mataram pada Babad Tanah Jawi," *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 12, no. 2 (December 2021), <https://doi.org/10.37014/jumantara.v12i2.1346>.

⁷¹ Rizal Zamzami, *Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati, 1584-160*, 2, no. 2 (2018).

VOC. Di sinilah, politik aliansi VOC bermain, dengan meminta imbalan berupa kekuasaan atas wilayah pelabuhan. Akhirnya, dengan negoisasi tersebut, VOC menguasai hampir seluruh kota pelabuhan di pantai utara Jawa⁷².

Setelah pelabuhan-pelabuhan di pesisir Jawa mulai dikuasai VOC, dominasi keraton melemah, *power* di mata para bupati menurun. Sehingga pada tahun 1677, praktis bupati-bupati yang awalnya tunduk pada keraton, kini tunduk pada VOC. Lalu, VOC membatasi aktivitas dagang para bupati dengan lebih ketat, terutama yang berhubungan dengan wilayah Maluku dan Banten. VOC yang mengetahui bahwa *power* keraton melemah di mata bupati, ia segera membuat aturan yang ketat di pelabuhan. Lambat laun bupati-bupati ini tidak lagi memiliki akses dengan saudagar India maupun Timur Tengah. Sehingga monopoli dan hegemoni VOC semakin kokoh atas bupati-bupati di Jawa.

Dinamika tersebut selanjutnya melahirkan dua *power* monopolistik yakni kekuatan “pesisir” yang dikuasai oleh VOC, dengan kekuatan politik “pedalaman” yang dikendalikan oleh keraton. Dualisme kekuatan inilah yang melahirkan arus politik di Jawa semakin dinamis. Para bupati “pedalaman” merasa punya kepentingan yang besar pada VOC untuk dagang sehingga dapat menumpuk keuntungan dan materi. Sebab, semakin kaya seorang bupati maka semakin kuat kekuasaannya. Dari sinilah, para bupati akhirnya semakin harmonis dengan VOC, namun sebaliknya sering berseteru dengan keraton. Ini semakin menampakkan bahwa *power* “pesisir” lebih kuat pengaruhnya ketimbang kekuasaan keraton di “pedalaman”. Pembagian ini tidaklah asing bagi struktur kerajaan yang ada di Jawa. Wertheim sebagaimana dikutip Pribadi telah mengidentifikasi tipe struktur kerajaan yang di masyarakat Nusantara. *Pertama*, Kerajaan Pedalaman yang bersifat birokratik terutama ditemukan di Jawa. Ia mengandalkan jasa dan suplai yang dipungut dari petani dan para pemimpin lokal seperti bupati dan gubernur. *Kedua*, Kerajaan Pelabuhan, yang mana ia mengandalkan perdagangan luar negeri⁷³. Tarik menariknya dua kekuatan tersebut tentu tidak dapat dielakkan. Kasus semacam ini bisa saja menimbulkan apa yang disebut dalam konteks historiografi modern dengan, “bentrokan antara dua kekuatan monopolistik”⁷⁴.

Islamisasi di Solor

Solor memiliki banyak bandar yang menjadi persinggahan kaum pedagang mulai dari Pamakayo, Lohayong, Menanga, hingga Labala⁷⁵. Oleh karena itu, Solor diperebutkan banyak kekuatan seperti Portugis, Belanda, Kerajaan Larantuka dan raja-raja Liruai di Timor. Keempat kekuatan ini, dalam catatan sejarah, silih berganti berkuasa di Solor; saling bantu, terkadang saling serang.⁷⁶

⁷² Leirissa, Ohorella, and Tangkilisan, *Sejarah Perokonomian Indonesia*.

⁷³ Yanwar Pribadi, “Era Niaga di Nusantara pada Masa Kerajaan Islam 1500-1700,” *Al-Qalam* (Banten, Al-Qalam) 22, no. 1 (2005).

⁷⁴ ANRI, *Korespondensi Diplomati antara Kerajaan Siam dan Kastel Batavia selama Abad Ke-17 dan Ke-18* (Jakarta: ANRI/TCF, 2018).

⁷⁵ Ambarak A. Bazher, *Islam Di Timor Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

⁷⁶ Didik Pradjoko, “Perebutan Pulau Dan Laut: Portugis, Belanda Dan Kekuatan Pribumi Di Laut Sawu Abad XVII-XIX,” paper presented at Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta, *Konferensi Nasional Sejarah VIII*, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 16 Nopember 2006.

Van Fraassen mengatakan bahwa di mana ada perdagangan maka Islam akan mengikuti ⁷⁷. Pernyataan ini, meski sulit dijadikan tolok ukur untuk memprediksi awal kedatangan Islam di Solor, hanya saja bisa menjadi dalil bahwa Islam di Solor telah lama bercokol. Ada temuan bahwa pada abad ke-13 seorang ulama bernama Sayyid Rifauddin pernah datang dan berdakwah di Solor ⁷⁸. Sehingga berangkat dari temuan tersebut sejarawan membuat kesimpulan bahwa kedatangan Islam di Solor sejak abad ke-13. Ada juga yang mengacu pada kesultanan Terong yang berdiri pada abad ke-16, tepatnya di pulau Adonara yang berdampingan dengan pulau Solor. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1580, Kesultanan Terong melakukan perlawanan pada Portugis. Dimana Portugis, menurut Rouffaer baru mendirikan pemukiman di Solor sekitar tahun 1563 ⁷⁹. Popularitas Kesultanan Terong ini dijadikan sebagian peneliti untuk menyatakan bahwa Islam masuk di Solor pada abad ke-16, meski tidak ada kejelasan apakah pada awal abad atau di pertengahan.

Ada juga yang secara eksplisit menyebut Islam masuk ke Solor sebelum tahun 1520. Ini berpijak pada sejarah Katholik yang menyatakan bahwa ketika Katholik masuk ke Solor pada tahun 1520, Parera menyebut sudah ada Islam di Flores. Kesimpulan ini juga berpijak pada hubungan yang dipastikan sudah terjalin antara Solor dengan Jawa, Sumatera dan Kalimantan; yang mana pulau-pulau tersebut sudah mengenal Islam dan menjadi persinggahan pedagang muslim sebelum abad ke-15 ⁸⁰. Kesimpulan tersebut menguatkan Dietrich yang mengatakan bahwa pada abad ke-16 masyarakat Solor pernah meminta Kesultanan Ternate agar mengirim keluarga Ternate untuk diangkat menjadi Sultan di Solor ⁸¹. Permintaan masyarakat Solor ini dipahami oleh Barnes sebagai bukti bahwa Solor sejak lama berada dalam kendali Ternate ⁸². Artinya, pada abad ke-16 sudah ada masyarakat Muslim di Solor, meski belum ada kesultanan di sana. Pada abad ini juga, di Adonara, pulau yang berdampingan dengan Solor, Islam sudah berkembang bahkan sudah berdiri kesultanan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedatangan Islam pertama di Solor adalah abad ke-13, tapi memiliki otoritas dan kekuasaan, baru pada abad ke-16.

Kesultanan-kesultanan di wilayah Timur Nusantara, adalah jejak-jejak Islam yang nyata. Diantara kesultanan yang masyhur diceritakan dalam sejarah Islam di Solor adalah Solor Watan Lema (Negeri Lima Pantai). Watan bukan hanya istilah topografis tapi juga mengarah pada identitas Islam ⁸³. Ini merupakan persekutuan dari lima kerajaan yang tumbuh di pelabuhan yakni Lohayong, Lamakera, Lamahela, Terong dan Labala ⁸⁴. Semangat yang dibangun dari

⁷⁷ Dietrich, "A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands."

⁷⁸ Muhamad Murtadlo, "Situs Menanga Solor Flores Timur: Jejak Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT)," *Jurnal Lektur Keagamaan* 15, no. 1 (May 2018): 97, <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.517>.

⁷⁹ Dietrich, "A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands."

⁸⁰ Murtadlo, "Situs Menanga Solor Flores Timur."

⁸¹ Dietrich, "A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands."

⁸² Barnes, "Avarice and Iniquity at the Solor Fort."

⁸³ Dietrich, "A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands."

⁸⁴ Murtadlo, "Situs Menanga Solor Flores Timur."

persekutuan lima kerajaan ini adalah melawan Portugis. Lima kesultanan tersebut berasal dari keturunan asli Solor. Dietrich menyebut gerakan “mendirikan kesultanan” di Solor yang dipelopori Sili Pertawi pada abad ke-17 ini dengan istilah indigenisasi Islam⁸⁵. Sili Pertawi sendiri dalam catatan sejarah ada yang menyebut dengan Kaitjil Protawi, Kaichili Protawi, Kaichil Protawi, Chili Protawi, atau Kaichil Partani. Kaichili adalah gelar dari Ternate untuk menyebut pangeran dari suatu kerajaan⁸⁶.

Indigenisasi secara bahasa didefinisikan sebagai pelokalan; indigenisasi Islam artinya upaya mengembangkan Islam dengan konteks lokal⁸⁷. Terkait indigenisasi Islam di Solor ini, dapat diidentifikasi sebagai bentuk *cultural power* dalam proses Islamisasi. Dalam hal ini, *keyword* yang bisa dijadikan pintu masuk untuk memahami maksud Dietrich tentang indigenisasi Islam ada pada redaksi “mendirikan kesultanan”. Artinya, dalam proses Islamisasi, masyarakat Solor mendesain kesultanan sebagai institusi yang akomodatif terhadap lokalitas untuk mengokohkan kekuasaan dan kepentingan politik dalam melawan kolonialisme. Dietrich mengisyaratkan bahwa kepentingan politik mendirikan kesultanan di wilayah timur Nusantara adalah semangat anti Portugis yang secara umum dapat dikatakan anti kolonial. Karena Sultan Menanga memimpin lima kerajaan tersebut tujuannya adalah untuk melawan Portugis karena telah membangun benteng di Lohayong⁸⁸.

Istilah indigenisasi ini juga pernah digunakan Hoesterey, yang menganotaskan pada pribumisasi Islam yang dikonsepskan Gus Dur. Dimana konsep indigenisasi Gus Dur basisnya juga anti kolonial⁸⁹. Maka, ada titik temu antara indigenisasi yang dimaksud Dietrich di Solor dengan indigenisasi perspektif Hoesterey. Pribumisasi Islam yang diwacanakan Gus Dur adalah bagian dari Indigenisasi Islam dengan gerakan budaya sebagai wadah akomodatif Islam. Sedangkan indigenisasi di wilayah timur Nusantara abad ke-17 menggunakan institusi politik sebagai wadah Islam akomodatif yakni dengan gerakan mendirikan kesultanan. Artinya, indigenisasi Islam memiliki beberapa pola, meski semangatnya sama-sama anti kolonial dalam bentuk ekspresi gerakan budaya dan gerakan politik.

Dari perspektif indigenisasi, Kesultanan Solor Watan Lema mampu memanfaatkan semangat anti kolonial sebagai kekuatan untuk mendirikan kesultanan demi terwujudnya perlawanan terhadap Portugis. Kesultanan didirikan sebagai benteng sekaligus amunisi untuk mempertahankan diri dan melakukan perlawanan terhadap budaya luar. Kesultanan menyatukan komunitas-komunitas yang seringkali bersaing dan berseteru. Menurut Cacegas sebagaimana dikutip

⁸⁵ Dietrich, “A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands.”

⁸⁶ Barnes, “Avarice and Iniquity at the Solor Fort.”

⁸⁷ Canra Purnama et al., “Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 1 (January 2024): 26–35, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1.1740>.

⁸⁸ Murtadlo, “Situs Menanga Solor Flores Timur.”

⁸⁹ James B. Hoesterey, “Globalization and Islamic Indigenization in Southeast Asian Muslim Communities,” *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 3, no. 2 (2022).

Barnes bahwa sebelum kesultanan berdiri, sekitar abad ke-14, tidak ada raja di Solor; setiap wilayah memiliki tuan dan kapten sendiri ⁹⁰.

Portugis memiliki semangat Kristenisasi dan kesultanan membangun kebudayaan yang menyokong Islamisasi. Dalam konteks ini, Islam tidak sepenuhnya ingin dipertentangkan dengan Kristen, tapi dijadikan simbol perlawanan terhadap Portugis. Sehingga target kesultanan bukan melawan Kristen, tetapi melawan Portugis. Terbukti, Kesultanan Solor pernah meminta bantuan Belanda untuk mengusir Portugis ⁹¹.

Simpulan

Pendidikan tenaga farmasi menjadi pilihan pemerintah Hindia Belanda sebagai upaya preventif wabah dan penyakit di masyarakat. Ketika impor tenaga farmasi ke Hindia Belanda memiliki banyak kekurangan. Pada pertengahan abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan *Apotheker Assistenten School* (Sekolah Asisten apoteker) sebagai pendidikan bagi asisten apoteker di Hindia Belanda. Sekolah Asisten Apoteker diselenggarakan karena beberapa alasan. Alasan *pertama*, kebutuhan tenaga farmasi bertolak belakang dengan situasi keuangan pemerintah Hindia Belanda. *Kedua*, kurangnya kesempatan untuk lulus ujian apoteker, padahal apotek perlu melakukan pergantian pegawai apotek. *Ketiga*, dapat menghasilkan tenaga kerja dengan upah dan gaji minimum. *Keempat*, memberikan keuntungan Negara dalam bidang farmasi (penjualan obat).

Sekolah Asisten Apoteker dibuka pada tahun 1923 sesuai dengan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie* tanggal 28 Januari 1923. Pembukaan Sekolah tersebut tercantum dalam *Staatsblad* No. 50 Tahun 1923 tentang penetapan pelatihan petugas apoteker dengan nama “Sekolah Asisten Apoteker”. Sekolah Asisten Poteker adalah kepanjangan dari program Pelatihan *Apothekerbediende* sejak tahun 1918. Sekolah Asisten Apoteker bertempat di gedung lama STOVIA. Sekolah menggunakan kurikulum pelatihan *Apothekerbediende*, dengan masa belajar selama dua tahun. Materi pembelajaran terdiri atas materi dasar dan materi kejuruan. Murid Sekolah Asisten Apoteker terdiri atas siswa Eropa, Cina maupun Bumiputera baik laki laki maupun perempuan. Siswa tidak lebih dari 50 siswa setiap tahun dan selalu mengalami peningkatan. Tahun 1934, Pemerintah menutup Sekolah Asisten Apoteker dengan alasan krisis keuangan.

Daftar Sumber

A. Bazher, Ambarak. *Islam Di Timor Timur*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Abdullah, Taufik, ed. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.

Ali, Ismail, Singgih Tri Sulistiyono, and Encep Supriatna. “Memertabatkan Semula Sejarah Maritim Sebagai Suatu Disiplin dan Cadang Ilmu dalam Mendepani Perkembangan Semasa Ilmu Kelautan Modern.” *Jurnal Kemaritiman*:

⁹⁰ Barnes, “Avarice and Iniquity at the Solor Fort.”

⁹¹ Barnes, “Avarice and Iniquity at the Solor Fort.”

- Indonesian Journal of Maritime* 2, no. 2 (December 2021): 68–93.
<https://doi.org/10.17509/ijom.v2i2.40659>.
- ANRI. *Korespondensi Diplomati antara Kerajaan Siam dan Kastel Batavia selama Abad Ke-17 dan Ke-18*. Jakarta: ANRI/TCF, 2018.
- Ardi, Fahmi, Muhammad Mabur, and Viyan Hendra E. A. “Sejarah dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia.” *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (June 2021): 7–11. <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.02>.
- Barnes, R.H. “Avarice and Iniquity at the Solor Fort.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 143, no. 2 (January 1987): 208–36.
<https://doi.org/10.1163/22134379-90003326>.
- Barsihannor ed. *Islam, Literasi Dan Budaya Lokal*. Makassar: Penerbit UIN Alauddin Press, 2014.
- Basori, Hasan. “Hukum Islam Nusantara: Diaspora Undang-Undang Malaka di Kesultanan Aceh Abad Ke-17.” *Tashwirul Afkar* 38, no. 02 (December 2020).
<https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.23>.
- Dietrich, Stefan. “A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 140, no. 2 (1984): 317–26.
<https://doi.org/10.1163/22134379-90003420>.
- Edyar, ed. *Sejarah Peradaban Islam*. Busman. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009.
- Fahmi, Muhammad Nabil, Ida Fitri Anggarini, and Obaidul Hoque. “The History of Sunan Bonang Mandala in The Lasem Chronicle (Carita Lasem).” *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 9, no. 1 (July 2024): 20–38.
<https://doi.org/10.18784/analisa.v9i1.2219>.
- Gaynor, Jennifer L. “Maritime Southeast Asia: Not Just a Crossroads.” *Association for Asian Studies* 9, no. 2 (2014): 17–18.
- Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Hall, D G E. *A History of South-East Asia*. London: Macmillan Education UK, 1981. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-16521-6>.
- Hoesterey, James B. “Globalization and Islamic Indigenization in Southeast Asian Muslim Communities.” *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 3, no. 2 (2022).
- Horridge, A. *Perahu Layar Tradisional Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

- Inagurasi, Libra Hari. "SITUS PANTAI LHOK CUT DAN LUBUK SEBAGAI PELABUHAN KOSMOPOLITAN DI SELAT MALAKA ABAD KE 13—15." *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 10, no. 1 (July 2021): 1–16. <https://doi.org/10.24164/pw.v10i1.351>.
- Jahroni, Jajang. "Islamisasi Pantai Utara Jawa: Menelusuri Penyiaran Islam di Tanah Betawi." *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 2 (December 2016): 369. <https://doi.org/10.31291/jlk.v14i2.506>.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Kersten, Carool. *Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradaban Di Nusantara*. 2nd ed. Vol. 1. Jakarta: Baca, 2017.
- Laffan, Michael. *The Making of Indonesian Islam*. Yogyakarta: Bentang, 2015.
- Laughton, Leonard G. Carr. *Old Ship Figure-Heads and Sterns*. New York: Dover Publications, 2011.
- Leirissa, R.Z., G.A. Ohorella, and Yuda B. Tangkilisan. *Sejarah Perokonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
- . *Sejarah Perokonomian Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh: Jaman Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Lopa, Baharudin. *Djalanja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*. Jakarta: Perusahaan Pertjetakan Negara Djakarta, 1962.
- Mahan, Alfred Thayer. *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. New York: Dover Publications, Inc, 1987.
- Mahdi, Waruno. "Yavadvipa and the Merapi Volcano in West Sumatra." *Archipel* 75, no. 1 (2008): 111–43. <https://doi.org/10.3406/arch.2008.4083>.
- Meilink-Roelofs, M. A. P. *Asian Trade and European Influence: In the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. Dordrecht: Springer Netherlands, 1962. <https://doi.org/10.1007/978-94-011-8850-0>.
- Murphey, Rhoads. "On Evolution." In *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th-20th Centuries*, edited by Frank Broeze. Kinsington: New South Wales University Press, 1989.
- Murtadlo, Muhamad. "Situs Menanga Solor Flores Timur: Jejak Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT)." *Jurnal Lektur Keagamaan* 15, no. 1 (May 2018): 97. <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.517>.

- Oktaviana, A.A. “Teknik Menggerakkan Perahu Yang Terekam Dalam Seni Cadas Sebagai Kekayaan Seni Dan Maritim Di Indonesia.” In *Arkeologi Untuk Publik, Rahardjo, S. (Ed)*. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, 2012.
- Parwati, Ni Putu Yuniarika. “Pengaruh Penyerangan Sultan Agung Ke Batavia Terhadap Kondisi Politik Dan Ekonomi Mataram Tahun 1613-1646.” *Social Studies: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2014).
- Pijnappel. “Ptolemaeus En de Indische Archipel.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 1, vol. 17 (January 1870): 33–68. https://brill.com/view/journals/bki/17/1/article-p36_14.xml?language=en.
- Pires, Tome. *Suma Oriental*. Vol. 1. 1. New Delhi: AES Publication, 2005.
- . *The Suma Oriental*. London: The Hakluyt Society, 1944.
- Pradhani, Sartika Intaning. “Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini.” *Lembaran Sejarah* 13, no. 2 (February 2018): 186. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542>.
- Pradjoko, Didik. “Perebutan Pulau Dan Laut: Portugis, Belanda Dan Kekuatan Pribumi Di Laut Sawu Abad XVII-XIX.” Paper presented at Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta. *Konferensi Nasional Sejarah VIII*, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 16 Nopember 2006.
- Pribadi, Yanwar. “Era Niaga di Nusantara pada Masa Kerajaan Islam 1500-1700.” *Al-Qalam* (Banten, Al-Qalam) 22, no. 1 (2005).
- Purnama, Canra, M. Ied Al-Munir, Muh. Rusydy, and Aprizal Wahyudi Diprata. “Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 1 (January 2024): 26–35. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1.1740>.
- Rangkuti, Nurhadi. “Kajian ‘Arkeologi Situs Masa Sejarah’ Di Lasem: Pergeseran Pusat Kegiatan.” *Berkala Arkeologi* 17, no. 1 (May 1997): 38–48. <https://doi.org/10.30883/jba.v17i1.768>.
- Rawlinson, H.G. *Intercourse between India and the Western World from the Earliest Times to the Fall of Rome*. Cambridge: Cambridge Univ Press, 1916.
- Reid, Anthony. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid 1: Tanah Dibawah Angin*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Reni, Wa Ode. “Sejarah Maritim Indonesia.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (2024): 120–27.
- Robson, S.O. “Java at the Crossroads; Aspects of Javanese Cultural History in the 14th and 15th Centuries.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* /

- Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 137, nos. 2–3 (1981): 259–92. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003500>.
- Sadzali, Asyhadi Mufsi. “EVALUASI KONSERVASI PERAHU KUNO PUNJULHARJO DAN PENGEMBANGAN OBJEK DI MASA DEPAN DALAM PERKUATAN IDENTITAS.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 2, no. 1 (2018). <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.
- Simanjuntak, Truman. “Progres Penelitian Austronesia Di Nusantara.” *AMERTA* 33, no. 1 (June 2015): 25. <https://doi.org/10.24832/amt.v33i1.211>.
- Soeharto. *Kumpulan Pidato-pidato Presiden dibidang Politik dan Keamanan (Polkam) Tahun 1977-1978*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1978.
- Sugiyarto, Sugiyarto, Agustinus Supriyono, and Endah Sri Hartatik. “Nobility and Land System in the Pre-Colonial Era of the Surakarta and Yogyakarta Kingdoms.” *Paramita: Historical Studies Journal* 30, no. 2 (September 2020): 208–17. <https://doi.org/10.15294/paramita.v30i2.23692>.
- Tjandrasasmita, Uka. *Sejarah Nasional Indonesia III*. 1st ed. Vol. 1. 1. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- , ed. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Valmiki, Maharsi. “Srimad Valmiki Ramayana.” Gita Press, 2020. <https://ia800509.us.archive.org/28/items/valmiki-ramayana-gita-press-english/Valmiki%20Ramayana%20Gita%20Press%20English.pdf>.
- Wahyudi, M. Ilham. “Sunan Giri dalam Legitimasi Kekuasaan Mataram pada Babad Tanah Jawi.” *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 12, no. 2 (December 2021). <https://doi.org/10.37014/jumantara.v12i2.1346>.
- Wilkinson, R.J. “Early Indian Influence in Malaysia.” *JRASMB*, 1935.
- Wilson, H. H. “Art. VIII.— *Account of the Foe Kúe Ki, or Travels of Fa Hian in India*.” *Journal of the Royal Asiatic Society* 5, no. 9 (January 1838): 108–40. <https://doi.org/10.1017/S0035869X00015185>.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- . *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Zamzami, Rizal. *Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati, 1584-160*. 2, no. 2 (2018).